

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran pemuda kini juga menjadi isu global yang dihadapi oleh berbagai negara, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketatnya persaingan di pasar kerja, ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri, serta meningkatnya pekerjaan non-reguler akibat otomatisasi dan digitalisasi. Di banyak negara, semakin tingginya tingkat pendidikan juga tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan berkualitas yang tersedia, sehingga banyak lulusan muda tetap menganggur atau bekerja di sektor informal. Negara-negara seperti Spanyol, Italia, Yunani, dan Tiongkok mencatat tingkat pengangguran pemuda di atas 20%, mencerminkan persoalan struktural yang mendalam. Bahkan di negara-negara dengan sistem pelatihan kerja yang baik seperti Jepang dan Jerman, tantangan integrasi pemuda ke dalam pasar kerja tetap menjadi perhatian serius. Pengangguran pemuda tidak hanya berdampak pada produktivitas nasional, tetapi juga memunculkan risiko sosial seperti alienasi, penurunan tingkat kelahiran, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi publik (Cobright 2025).

Pengangguran di kalangan pemuda, khususnya lulusan perguruan tinggi, menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Korea Selatan. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 1,26 juta pemuda di negara tersebut saat ini menganggur, dengan lebih dari setengahnya memiliki gelar sarjana atau lebih

tinggi (Straits 2023). Hal ini mencerminkan ketimpangan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan peluang kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja. Sementara sebagian besar tenaga kerja Korea Selatan, sekitar 20%, bekerja di sektor profesional, manajerial, atau administrasi (Woo-ryang and Su-hyeon 2024), jumlah ini tidak cukup untuk menyerap tingginya jumlah lulusan baru setiap tahun.

Pemuda dalam penelitian ini merujuk pada kelompok usia 15 hingga 29 tahun, yang merupakan sasaran utama program magang nasional. Penurunan ini dicatat berdasarkan keberhasilan peserta program memasuki dunia kerja formal setelah menyelesaikan masa magang. Penggunaan indikator pemuda usia 15–29 tahun penting untuk menunjukkan efisiensi program dalam membantu transisi dari pendidikan ke pekerjaan dalam kelompok usia produktif awal (Moel, Employment Policy 2021).

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah Korea Selatan telah menerapkan sejumlah kebijakan dan program, seperti *Employment Insurance* dan *National Employment Support System*. *Employment Insurance* menyediakan tunjangan pengangguran, insentif untuk re-employment dini, serta subsidi pencarian kerja (Easyexpat 2024). Sementara itu, *National Employment Support System* menawarkan bantuan penghidupan stabil dan layanan penempatan kerja yang ditujukan kepada individu berpenghasilan rendah, pemuda pengangguran, serta perempuan yang kembali bekerja setelah jeda karier (Moel 2021).

Selain kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga mengembangkan program-program inovatif untuk mendukung pemuda. Di antaranya adalah *Youth*

Basic Income Project di Gyeonggi-do, yang memberikan pendapatan dasar sebesar 1 juta KRW per tahun kepada individu berusia 24 tahun untuk membantu mereka fokus pada pendidikan atau pengembangan minat mereka sambil mencari pekerjaan (Seoulz 2024). Program lain, seperti *Youth Allowance* dari Pemerintah *Metropolitan Seoul*, memberikan tunjangan bulanan sebesar 500.000 KRW selama enam bulan untuk membantu biaya pencarian kerja (SMG 2019). Di tingkat nasional, program seperti *Job Search Promotion Subsidy* dan *Youth Job Leap Support Fund* memberikan insentif keuangan kepada pencari kerja muda dan perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Program-program pemerintah Korea Selatan dalam menangani pengangguran pemuda memiliki beberapa aspek positif yang signifikan. Kebijakan seperti *Employment Insurance* dan *National Employment Support System* memberikan dukungan yang berarti bagi kelompok rentan, termasuk pemuda pengangguran, perempuan yang kembali bekerja, dan individu berpenghasilan rendah. Dukungan ini tidak hanya membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan (Koreapro 2023). Selain itu, program-program pelatihan kejuruan dan pengembangan keterampilan yang terintegrasi dalam kebijakan ini dianggap langkah positif untuk meningkatkan kemampuan kerja serta menjawab kesenjangan keterampilan di pasar kerja yang terus berkembang (Government 2024).

Namun, program ini tidak terlepas dari kritik dan tantangan. Salah satu kekhawatiran utama adalah beban ekonomi yang ditimbulkan. Biaya tunjangan

pengangguran terus meningkat secara signifikan, dengan total pengeluaran pemerintah mencapai lebih dari 1 triliun KRW pada Juni 2023 (JoongAng 2023). Anggaran besar ini memicu perdebatan apakah alokasi dana tersebut sudah optimal atau justru membebani ekonomi negara.

Selain itu, terdapat kritik bahwa besarnya tunjangan pengangguran menciptakan disinsentif untuk bekerja, terutama ketika jumlah tunjangan lebih tinggi daripada upah yang diperoleh dari pekerjaan berupah rendah. Situasi ini berpotensi membuat individu enggan untuk segera kembali ke dunia kerja, sehingga menghambat tujuan utama dari kebijakan tersebut (Koreapro 2023).

Tidak hanya itu, penyalahgunaan sistem juga menjadi perhatian. Laporan menunjukkan bahwa beberapa individu secara berulang kali mengklaim tunjangan pengangguran tanpa mencapai stabilitas kerja di antara klaim tersebut. Fenomena ini menunjukkan potensi celah dalam sistem yang memerlukan pengawasan lebih ketat dan reformasi kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan negara (Maximus 2023).

Dalam konteks analisis kebijakan publik, teori Wayne Parsons menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran pemuda di Korea Selatan. Parsons (1995) menekankan pentingnya memahami tahapan kebijakan, mulai dari *agenda setting*, di mana masalah pengangguran diangkat sebagai prioritas kebijakan, hingga *policy evaluation* dan *policy change*, yang berfokus pada penilaian keberhasilan kebijakan serta perumusannya kembali untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang (Parsons 1995).

Pada tahap *agenda setting*, pengangguran pemuda menjadi sorotan utama karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi negara. Isu ini mendapatkan perhatian publik dan elit melalui liputan media, opini masyarakat, serta prioritas politik yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, melalui *problem definition*, masalah pengangguran diidentifikasi tidak hanya sebagai kurangnya pekerjaan tetapi juga mencakup ketidaksesuaian keterampilan, beban ekonomi, dan tantangan struktural lainnya.

Tahapan *policy formulation* dan *policy implementation* menjadi kritis dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirancang relevan dengan kebutuhan pemuda yang menganggur. Program seperti *Employment Insurance* dan *National Employment Support System* menunjukkan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Namun, pelaksanaannya membutuhkan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya efektif dan mencapai target kelompok sasaran.

Pada tahap *policy evaluation*, keberhasilan kebijakan diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi tenaga kerja pemuda, pengurangan tingkat pengangguran, dan efektivitas program pelatihan keterampilan. Berdasarkan evaluasi ini, *policy change* menjadi tahap akhir yang diperlukan untuk mengadaptasi kebijakan terhadap kondisi yang berubah. Dalam kasus Korea Selatan, meningkatnya kritik terhadap sistem tunjangan pengangguran menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan kebijakan tetap adil, berkelanjutan, dan mendukung integrasi pemuda ke dalam pasar kerja (Yujin 2020).

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat meningkatnya debat publik mengenai dinamika kebijakan pengangguran di Korea Selatan. Beban ekonomi yang semakin berat dan tantangan sosial yang kompleks, termasuk tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan muda, memperlihatkan urgensi yang mendalam untuk melakukan reformasi kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disusun maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana dinamika pelaksanaan kebijakan *Youth Internship Program for Central Government Agencies* dalam menangani pengangguran di kalangan pemuda di Korea Selatan pada tahun 2023–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pelaksanaan kebijakan *Youth Internship Program for Central Government Agencies* dalam mengatasi pengangguran di kalangan pemuda di Korea Selatan pada tahun 2023–2024, dengan mengkaji tantangan kebijakan dari perspektif kebijakan publik dan hubungan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang penting baik dari sisi akademis maupun praktis. Dengan mengevaluasi kebijakan pengangguran yang ada,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai efektivitas kebijakan tersebut serta menawarkan solusi yang relevan untuk tantangan pengangguran di Korea Selatan.

1.4.1 Manfaat akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai kebijakan pengangguran, terutama dalam konteks pemuda lulusan perguruan tinggi.
- Menambah pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja.
- Menyediakan data empiris yang berguna untuk studi lebih lanjut mengenai kebijakan pengangguran di negara berkembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah Korea Selatan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi pengangguran di kalangan pemuda.
- Memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dalam memperbaiki program-program pengangguran yang sudah ada.
- Membantu organisasi dan perusahaan dalam memahami kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja bagi pemuda.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini terdiri atas lima bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menguraikan tentang fenomena pengangguran di kalangan pemuda lulusan perguruan tinggi di Korea Selatan. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik dari segi akademis maupun praktis. Di akhir bab, akan dijelaskan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai struktur laporan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berfokus pada teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan pengangguran serta evaluasi kebijakan di sektor tenaga kerja. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan kerangka teoritik yang menjadi landasan penelitian ini, kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel-variabel yang dianalisis, serta hipotesis atau argumen utama yang diuji dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan kualitatif atau kuantitatif, serta teknik analisis data yang akan digunakan, juga dijelaskan di bab ini.

BAB III GAMBARAN DAN KEBIJAKAN PENGANGGURAN PEMUDA DI KOREA SELATAN

Bab ini membahas masalah pengangguran pemuda di Korea Selatan, terutama yang terjadi di kalangan lulusan perguruan tinggi. Peneliti mengidentifikasi faktor-faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi tingkat pengangguran, serta ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pemuda dan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya, pembahasan berfokus pada kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran pemuda, seperti program pelatihan kerja, insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan pemuda, dan dukungan kewirausahaan. Data statistik dan analisis terkait dampak kebijakan ini juga disertakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

BAB IV *EVALUASI KEBIJAKAN *YOUTH INTERNSHIP PROGRAM FOR CENTRAL GOVERNMENT AGENCIES* PEMUDA DI KOREA SELATAN*

Bab ini mengevaluasi kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam menangani pengangguran pemuda. Peneliti menggunakan teori tahapan kebijakan untuk menganalisis kebijakan *Youth Internship Program for Central Government Agencies* mulai dari penyusunan hingga implementasi. Evaluasi dilakukan dengan fokus pada keberhasilan dan hambatan-hambatan yang ada dalam setiap tahap kebijakan. Peneliti juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan

pasar kerja. Temuan ini memberikan wawasan penting mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan.

BAB V RENCANA PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, yang mencakup temuan utama terkait kebijakan pengangguran di Korea Selatan. Berdasarkan evaluasi yang ada, bab ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi pengangguran pemuda. Rekomendasi tersebut berfokus pada peningkatan kesesuaian antara pendidikan, keterampilan, dan kebutuhan pasar kerja, serta mencakup langkah-langkah baru yang dapat diambil untuk mencapai solusi jangka panjang.